KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2021

Jalan Cindua Mato No. 7 Bukittinggi
Telp/fax 0752-22782

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Bukittinggi, 31 Desember 2021
Sekretaris,

KOMISI PEMILIHAN UMUM SEKRETARIAT KOTA BUKITTINGGI

Ir. Kasdanil, SH
NIP. 19680912 199403 1 009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
PernyataanTanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos LaporanRealisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	46
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	53
F. Pengungkapan Penting Lainnya	58
VI. Lampiran	59

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
JL. CINDUA MATO NO. 7 BUKITTINGGI
TELEPON / FAXIMILE 0752-22782

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bukittinggi, 31 Desember 2021
Sekretaris,

Ir. Kasdanil, SH
NIP. 19680912 199403 1 009

Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari penerimaan kembali dari belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp.0,- (nol rupiah) atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.0.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 4.141.260.535,- atau mencapai 98.52 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 4.203.400.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Tahun 2021. Nilai Aset Tahun 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 864.983.177,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 82.379.450,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 776.057.059,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.6.546.668,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0; dan Rp. 864.983.177,- jadi total nilai kewajiban dan Ekuitas adalah Rp. 864.983.177,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.4.494.098.619,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(4.494.098.619). Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.(5.400.999),- dan sebesar Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(4.488.697.620,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp.4.273.576.054,- dikurangi defisit-LO sebesar Rp.(4.488.697.620),- kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. (1.957.470.591),- dan ditambah dengan transaksi antar entitas sebesar Rp (3.037.575.334),- sehingga terjadi kenaikan/penurunan entitas sebesar Rp. (3.408.592.877),- maka ekuitas akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp. 864.983.177,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan

keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021		% Terhadap Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	5.400.999	0,00	25.789.987
JUMLAH PENDAPATAN		**-**	**5.400.999**	**0,00**	**25.789.987**
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	2.484.993.000	2.481.192.637	99,85	2.407.926.706
Belanja Barang	B.4	620.122.000	561.783.696	90,59	1.451.821.080
Belanja Modal	B.5	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Operasi		**3.105.115.000**	**3.042.976.333**	**98,00**	**3.859.747.786**
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	-	-	0,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	-	-	0,00	-
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	-	-	0,00	-
Pinjaman dan Hibah	B.9	1.098.285.000	1.098.284.202	100,00	9.548.879.257
Belanja Barang Hibah	B.10	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Operasi		**1.098.285.000**	**1.098.284.202**	**0,00**	**9.548.879.257**
JUMLAH BELANJA		**4.203.400.000**	**4.141.260.535**	**98,52**	**13.408.627.043**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NERACA
PER 31 Desember 2021 DAN 2020
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 December 2021	31 December 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	3.092.302.098
Piutang PNBP	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	83.601.667
Persediaan	C.9	82.379.450	82.379.450
Persediaan yang Belum Diregister	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		82.379.450	3.258.283.215
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.10	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.13	-	-
Peralatan dan Mesin	C.14	2.674.507.079	2.604.503.079
Gedung dan Bangunan	C.15	131.228.000	131.228.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.17	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.18	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(2.029.678.020)	(1.724.704.170)
Jumlah Aset Tetap		776.057.059	1.011.026.909
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.20	-	-
Aset Lain-Lain	C.21	153.014.687	153.014.687
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(146.468.019)	(144.831.352)
Jumlah Aset Lainnya		6.546.668	8.183.335
JUMLAH ASET		**864.983.177**	**4.277.493.459**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.23	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	-	3.917.405
Hibah Yang Belum Disahkan	C.25	-	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	3.917.405
JUMLAH KEWAJIBAN		-	**3.917.405**
EKUITAS			
Ekuitas	C.26	864.983.177	4.273.576.054
JUMLAH EKUITAS		**864.983.177**	**4.273.576.054**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**864.983.177**	**4.277.493.459**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 December 2021	31 December 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.481.192.637	2.407.926.706
Beban Persediaan	D.3	28.101.500	282.321.389
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.516.671.715	10.512.519.848
Beban Pemeliharaan	D.5	78.311.450	59.753.104
Beban Perjalanan Dinas	D.6	50.580.900	11.350.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada	D.7		
Beban Bantuan Sosial	D.8		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	339.240.417	347.000.108
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
JUMLAH BEBAN		**4.494.098.619**	**13.620.871.155**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(4.494.098.619)**	**(13.620.871.155)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		5.400.999	25.789.987
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	31.500
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		5.400.999	25.758.487
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(4.488.697.620)**	**(13.595.112.668)**
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		**(4.488.697.620)**	**(13.595.112.668)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 DAN 2020
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 December 2021	31 December 2020
EKUITAS AWAL	**E.1**	**4.273.576.054**	**1.569.508.502**
SURPLUS/DEFISIT LO	**E.2**	**(4.488.697.620)**	**(13.595.112.668)**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	**E.3**	**(1.957.470.591)**	**-**
Penyesuaian Nilai Aset	E.4	-	-
Koreksi Nilai Pesediaan	E.5	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.6	32.629.900	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.7		-
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.9	(1.990.100.491)	-
Koreksi Lain-lain	E.10	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	**E.11**	**3.037.575.334**	**16.299.180.220**
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		**(3.408.592.877)**	**2.704.067.552**
EKUITAS AKHIR		**864.983.177**	**4.273.576.054**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi merupakan intansi vertikal yang mempunyai kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Komisi Pemilihan Umum didirikan sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian untuk meningkatkan kualitas Pemilihan Umum dan Pemilihan di Indonesia yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan dan akuntabel. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Entitas berkedudukan di Jalan Cindua Mato No. 7 Bukittinggi – Sumatera Barat

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan Pemilhan Umum Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi. Melalui peran tersebut diharapkan menghasilkan Pemilihan Umum yang berkualitas.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Komisi Pemilihan Umum mempunyai visi "*Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang*

memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
- Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Walikota dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Pendekatan Penyusunan Laporan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola

Keuangan

oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas

dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beben

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	**Uraian**	**Penyisihan**
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo.	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan	10%

	pelunasan.	
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN.	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat

tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan

aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  a. Kewajiban Jangka Pendek

     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

     Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang

     Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

URAIAN	31 Desember 2021	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH DIREVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	**-**	**-**
Belanja		
Belanja Pegawai	2.298.257.000	2.484.993.000
Belanja Barang	1.670.549.000	1.648.403.000
Belanja Modal	70.004.000	70.004.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	**4.038.810.000**	**4.203.400.000**

Realisasi Pendapatan Rp.5.400.999.

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Negara per Tahun 2021 adalah sebesar Rp.5.400.999,-

Rincian Estimasi Pendapatan Dan Realisasi BNPB lainnya per tanggal pelaporan dapat dilihat dalam table berikut ini:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	5.400.999	-
Jumlah	**-**	**5.400.999**	**-**

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per Tahun 2021 sama dengan Tahun 2020. Hal ini karena Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi melakukan pelelangan Kertas berkas Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun perolehan 2020 dengan berat ± 963 Kg dan Kotak Suara Duplex perolehan tahun 2020 dengan berat ± 932 Kg dengan Risalah Lelang Nomor 230/09/IX/2021 tanggal 19 September 2021, NTPN. 078A955DEDQ6RC2H.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Smt II Th 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	0,00
Pendapatan Lain-lain	5.400.999	25.789.987	477,50
Jumlah	**-**	**-**	**477,50**

Realisasi Belanja Negara Rp.4.141.260.535,-

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp.4.141.260.535,- atau 98.52 % dari anggaran belanja sebesar Rp.4.203.400.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2021

URAIAN	Semester II TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg
Belanja Pegawai	2.484.993.000	2.481.192.637	99,85
Belanja Barang	1.648.403.000	1.590.063.898	96,46
Balanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
Belanja Modal	70.004.000	70.004.000	100,00
Total Belanja Kotor	**4.203.400.000**	**4.141.260.535**	**98,52**
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah	**4.203.400.000**	**4.141.260.535**	**98,52**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut

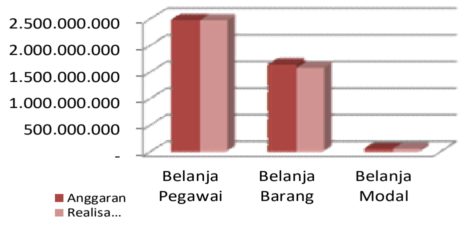

Dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan 69,11 %. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2021 Belanja Hibah Tahapan Pemilukada 2020 KPU Kota Bukittinggi telah berakhir.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	Realisasi Semester II TA 2021	Realisasi Semester II TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.481.192.637	2.407.926.706	3,04
Belanja Barang	561.783.696	1.451.821.080	(61,30)
Pinjaman dan Hibah	1.028.280.202	9.427.404.257	(89,09)
Belanja Modal	70.004.000	121.475.000	(42,37)
Jumlah	**4.141.260.535**	**13.408.627.043**	**(69,11)**

Belanja Pegawai Rp 2.481.192.637, ,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 2.481.192.637,- dan Rp 2.407.926.706,- Realisasi belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,04% (persen) dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya beberapa Pegawai yang naik pangkat dan kenaikan Gaji Berkala.

Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2021 dan Per 31 Desember 2020

URAIAN	Realisasi Per 31 Desember 2021	Realisasi Per 31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	975.334.632	901.928.926	8,14
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	1.505.858.005	1.505.997.780	(0,01)
Belanja Honorarium			-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**2.481.192.637**	**2.407.926.706**	**3,04**
Pengembalian Belanja Pegawai	244	72	
Jumlah Belanja	**2.481.192.393**	**2.407.926.634**	**3,04**

Belanja Barang Rp. 1.590.063.898-.

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.590.063.898,- dan Rp. 10.865.944.341,-

Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami penurunan sebesar 85.37% dari Realisasi Belanja Barang TA 2020. Dikarenakan sudah berakhirnya Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kota Bukittinggi.

Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2021 dan Per 31 Desember 2020

URAIAN	REALISASI Per 31 Desember 2021	REALISASI Per 31 Desember 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	0		-
Belanja Barang Non Operasional	-		-
Belanja Barang & Jasa	1.433.070.048	10.512.519.848	-
Belanja Pemeliharaan	78.311.450	59.753.104	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	50.580.900	11.350.000	-
Belanja Persediaan	28.101.500	282.321.389	-
Jumlah Belanja Kotor	**1.590.063.898**	**10.865.944.341**	**(85,37)**
Pengembalian Belanja		-	
Jumlah Belanja	**1.590.063.898**	**10.865.944.341**	**(85,37)**

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. KPU Kota Bukittinggi tidak mempunyai belanja modal tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	**0,00**
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**0,00**

Belanja Modal 70.004.000,-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebesar Rp 70.004.000 dan Rp 121.475.000,- mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020. Hal ini dikarenakan di Tahun 2021 tidak tersedia anggaran untuk belanja modal peralatan dan mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Komputer Unit /Laptop/HP	18.000.000	0	**0,00**
Printer/PC	15.000.000	101.455.000	**6,76**
Meubelair	37.004.000	17.490.000	**0,47**
Thermogun	0	2.530.000	**0,00**
Jumlah Belanja Kotor	**70.004.000**	**121.475.000**	**1,74**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**70.004.000**	**121.475.000**	**1,74**

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0; dan Rp.0;. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 sama dibandingkan Realisasi TA 2020. Hal ini disebabkan karena Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiliki anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI SEMESTER II TA 2021	REALISASI SEMESTER II TA 2020	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**0**	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	**0**	**0**	0,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0,- Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 adalah sama dibandingkan Realisasi TA 2020 . Hal ini disebabkan karena Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiliki anggaran belanja modal Jalan,Irigasi dan Jaringan

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI Smt I TA. 2021	REALISASI Smt I TA. 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**0**	
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	**0**	**0**	**0,00**

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainya Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0; dan Rp.0;. Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2021 sama dibandingkan Realisasi Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiliki anggaran belanja modal lainnya.

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0; dan Rp.0;. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada Tahun 2021 adalah sama dibandingkan Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiliki anggaran belanja modal bantuan sosial.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- karena kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP sudah dipertanggung-jawabkan atau sudah disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal Neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2021 dan TA 2020

Keterangan	TA 2021	TA 2020
Uang Tunai		-
Bank BNI	-	-
Jumlah	**18.000.000**	**-**

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0.- Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di Bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. (Dalam hal ini KPU Kota Bukittinggi tidak memiliki bendahara penerimaan)

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Tahun 2021 dan 2020

Keterangan	TA 2021	TA 2020
Uang Tunai	-	-
Bank	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0,-.

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan TA. 2020 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 3.092.302.098,-

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis	TA 2021	TA 2020
Kas Lainnya di bendahara Pengeluaran	-	0
Kas Lainnya di K/L	-	3.092.302.098
Honor kegiatan yang belum dibagikan	-	0
Pengembalian belanja belum disetor ke kas negara	-	0
Jumlah	**-**	**3.092.302.098**

Piutang Bukan Pajak

Rp0.

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0; dan Rp.0;. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan

pembayarannya. Hal ini disebabkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiliki Piutang Bukan pajak Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian	TA 2021	TA 2020
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	**-**	**-**

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp 0

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0; dan Rp.0;. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporanyang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

No	Nama	TA 2021	TA 2020
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-		
Jumlah		**-**	**-**

Bagian Lancar TPA Rp0

C.6 Bagian Lancar TagihanPenjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiliki bagian lancar.

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	TA 2021	TA 2020
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
Jumlah		**-**	**-**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek Rp0;

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendekper tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Pendekadalah merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Jangka Pendekpada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Pendek

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0,00%	-
Diragukan	-	0,00%	-
Macet	-	0,00%	-
Jumlah	**-**		**-**
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0,00%	-
Diragukan		0,00%	-
Macet		0,00%	-
Jumlah	**-**		**-**
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0,00%	-
Diragukan		0,00%	-
Macet		0,00%	-
Jumlah	**-**		**-**
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**-**		**-**

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka Rp 0,-

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0;- dan Rp. 83.601.667;. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal Neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Barang atau jasa ini berupa sewa gudang dan rental Kendaraan Roda 4 (Empat) serta jasa internet *speedy* untuk kebutuhan operasional KPU Kota Bukittinggi pada Tahun 2020.

C.9 Persediaan

Persediaan Rp 82.379.450

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 82.379.450 dan Rp 82.379.450,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan pada Tahun 2021 dan TA 2020

Jenis	TA 2021	TA 2020
Barang Konsumsi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	82.379.450	82.379.450
Jumlah	**82.379.450**	**82.379.450**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR Rp 0;

C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 0; dan Rp 0;. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2021 dan TA 2020

No	Debitur	Smt. I TA. 2021	TH 2020
1			
2			
3			
Jumlah		-	-

Tagihan Penjualan Angsuran Rp.0

C.11 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA   Tahun 2021 dan 2020

No	Debitur	Semester I TA 2021	Semester I TA 2020
1			
2			
3			
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang   Tahun 2021

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar			
Kurang Lancar			
Diragukan			
Macet			
Jumlah	-	-	-
Tagihan PA			
Lancar			
Kurang Lancar			
Diragukan			
Macet			
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

C.13 Tanah

Tanah
Rp 0;

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 0; dan Rp 0;. Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiliki tanah. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2021	**-**
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	-
Saldo per 31 Des 2021	**-**

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahun 2021

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
Jumlah			**-**

Tanah Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dengan luas 453.75 m2 merupakan tanah Milik Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang terletak di Jl. Cindua Mato No.7 Bukittinggi berstatus pinjam pakai Sesuai Surat Pinjam Pakai Nomor 1/KB/KPU-Kota-003.435130/Tahun 2015 Tanggal 25 Maret 2015.

Peralatan dan

C.14 Peralatan dan Mesin

Mesin
Rp 2.674.507.079

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp 2.674.507.079 dan Rp 2.604.503.079. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2021	2.604.503.079
Mutasi tambah:	
Pembelian	70.004.000
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Des 2021	**2.674.507.079**

1. Mutasi transaksi Pengadaan Handphone dan Gimbal seharga Rp 18.000.000,-
2. Mutasi Transaksi Pembelian Printer seharga Rp 15.000.000,-
3. Mutasi Transaksi Pengadaan Meubelair seharga Rp 37.004.000,-

Gedung dan Bangunan
Rp131.228.000

C.15 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.131.228.000,- dan Rp.131.228.000.- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2021	131.228.000
Mutasi tambah:	-
Pembangunan tambahan ruang kelas	-
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Des 2021	**131.228.000**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2021	-
Nilai Buku per 31 Des 2021	**131.228.000**

Jalan,Jaringan dan Irigasi

C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021

Rp0

dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2021	**-**
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Des 2021	**-**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2021	-
Nilai Buku per 31 Des 2021	**-**

Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiiki jalan, jaringan dan irigasi.

Aset Tetap Lainnya Rp0

C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.0 dan Rp0. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini sampai Periode 31 Desember 2021, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2021	**0**
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 31 Des 2021	**0**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2021	0
Nilai Buku per 31 Des 2021	**0**

Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiliki aset tetap lainnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0; dan Rp0; yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiliki kontruksi dalam pengerjaan.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp. (2.029.678.020,-)

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp. 2.029.678.020; dan Rp1.724.704.170;. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Tahun 2021 dan 2020

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.674.507.079	2.029.678.020	644.829.059
2	Gedung dan Bangunan	131.228.000	0	131.228.000
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	**2.805.735.079**	**2.029.678.020**	**776.057.059**

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud Rp0

C.20 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp.0; dan Rp.0;.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak mempunyai aset tak berwujud. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	**-**
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2021	**-**
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2020	**-**

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud Tahun 2021

Uraian	Nilai Perolehan
-	0
-	0
Jumlah	**0**

Aset Lain-Lain Rp 153.014.687;

C.21 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per Tahun 2021 dan 2020 adalah Rp153.014.687 dan Rp153.014.687. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	153.014.687
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 30 Juni 2021	**153.014.687**
Akumulasi Penyusutan	145.649.686
Nilai Buku per 30 Juni 2021	**7.365.001**

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp(146.468.019)

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp (146.468.019); dan Rp. (144.831.352). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset tak Berwujud	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	153.014.687	146.468.019	6.546.668
Jumlah	**153.014.687**	**146.468.019**	**6.546.668**

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.23 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 0; dan Rp. 0;. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja tersebut sudah di pertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran dan sisanya sudah di setor ke kas negara pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.3.917.405. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Jumlah saldo tahun 2020 sebesar Rp 3.917.405 berasal dari jasa giro per 31 desember 2020 yang belum disetorkan ke kas negara. Tahun 2021 akun utang kepada pihak ketiga sudah nol karena sudah disetorkan ke kas negara sesuai bukti STS 033780 Tanggal 6 Februari 2021. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	-	Pendapatan Jasa Giro belum disetor ke kas negara
Potongan pajak yang belum disetor	-	Potongan pajak belanja UP belum disetor ke kas negara
Utang kepada Pihak ketiga lainnya	-	Dana yang belum dibagikan kepada yang berhak
Total	**-**	

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

C.25 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah
-	-
-	-
-	-
Total	**-**

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

C.26 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, beban yang masih harus dibayarkan pada KPU Kota Bukittinggi pada Tahun 2021 tidak ada.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar Th 2021 dan Tahun 2020

Uraian	Semester I TA 2021	TH 2020
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-

Ekuitas
Rp
864.983.177,-

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 864.983.177,- dan Rp. 4.273.576.054,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP
Rp0

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020. adalah sebesar Rp.0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2021 dan 2020

URAIAN	Semester I TA. 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	0	0	0%
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	0

KPU Kota Bukittinggi tidak memiliki PNBP.

Beban Pegawai Rp. 2.481.192.637;

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 2.481.192.637,- dan Rp. 2.407.926.706,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	614.863.500	602.090.200	2,12
Beban Tunjangan-tunjangan	164.684.132	159.759.726	3,08
Beban Pegawai	1.505.858.005	1.505.997.780	(0,01)
Beban Uang Makan	129.492.000	140.079.000	(7,56)
Beban Lembur	66.295.000	-	0,00
Jumlah	**2.481.192.637**	**2.407.926.706**	**3,04**

Beban Persediaan Rp28.101.500, -

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 28.101.500;,- dan Rp. 211.969.218;,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2021 dan 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020
Beban Persediaan Konsumsi	28.101.500	211.969.218
Beban Persediaan untuk Bahan Baku	-	70.352.171
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	**28.101.500**	**282.321.389**

Beban Barang dan Jasa Rp 1.516.671.715 ;

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 1.516.671.715; dan Rp.10.512.519.848;,- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena pada tahun 2021 KPU Kota Bukittinggi tidak sedang melaksanakan Tahapan Pemilihan lagi. Rincian Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	179.735.500	187.022.600	(3,90)
Beban Pengiriman Surat dinas Pos Pusat	129.800	78.000	66,41
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	108.480.000	141.840.000	(23,52)
Beban Barang Operasional Lainnya	17.478.000	15.474.000	12,95
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	15.750.222	0	0,00
Beban Barang non Operasional Lainnya	762.495.702	4.911.107.039	0,00
Beban Barang non Operasional Lainnya - Penanganan Pandemi Covid-19	2.910.150	938.268.300	0,00
Beban Bahan	20.109.720	4.042.000	397,52
Beban Honor Output Kegiatan	303.850.000	4.269.750.000	(92,88)
Baban Langganan Listrik	9.396.124	10.658.577	(11,84)
Baban Langganan Telepon	880.180	1.009.485	(12,81)
Baban Langganan Air	1.222.200	1.973.400	(38,07)
Beban Langganan Jasa Lainnya	45.925.450	24.146.447	90,20
Beban Langganan Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	0	7.150.000	0,00
Beban Sewa	48.308.667	0	0,00
Belanja Jasa Profesi			0,00
Beban Jasa Lainnya			0,00
Jumlah	**1.516.671.715**	**10.512.519.848**	**(85,57)**

Beban Pemeliharaan Rp 78.311.450,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 78.311.450 dan Rp 59.753.104,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya kenaikan realisasi pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.727.500	3.539.500	0,00
Beban Pemeliharaan Perakatan dan Mesin	70.583.950	56.213.604	25,56
Jumlah	**78.311.450**	**59.753.104**	**31,06**

Beban Perjalanan Dinas Rp 50.580.900,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 50.580.900,- dan Rp 11.350.000,-. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 39.230.900;- atau 345.65 % dibandingkan dengan tahun 2020. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	31.100.900	10.835.000	187,04
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.480.000	0	-
Beban Perjalanan Paket Meeting Dalam Kota	0		-
Beban Perjalanan Paket Meeting Luar Kota	0	515.000	-
Jumlah	**50.580.900**	**11.350.000**	**345,65**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2021 dan dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiliki beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat. Rincian Beban

Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN %)
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Jumlah	**0**	**0**	**0,00**

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Dalam hal ini, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiliki Beban Bantuan Sosial. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2021 dan dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Jumlah	**0**	**0**	**0,00**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp339.240.417;

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 339.240.417 dan Rp. 347.000.108,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	334.340.208	342.099.899	(2,27)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.263.542	3.263.542	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.636.667	1.636.667	-
Jumlah Penyusutan	**339.240.417**	**347.000.108**	**(2,24)**
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	**-**	**-**	**-**
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**339.240.417**	**347.000.108**	**(2,24)**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk

Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Th 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0,00
Belanja Modal BLU	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0,00
Jumlah	**0**	**0**	**0,00**

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp 5.400.999;-

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi melakukan kegiatan lelang berkas surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun perolehan 2020 dengan berat ± 963 Kg dan Kotak Suara Duplex perolehan tahun 2020 dengan berat ± 932 Kg dengan Risalah Lelang Nomor 230/09/IX/2021 Tanggal 19 September 2021, NTPN Nomor 078A955DEDQ6RC2H. Hal ini menyebabkan timbulnya pendapatan sebesar Rp. 5.400.999;-. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai tahun Lalu	0	0	0,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	5.400.999	25.789.987	(79,06)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	0,00
Beban Penyesuan Nilai Persediaan			0,00
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	0	0	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**5.400.999**	**25.789.987**	(79,06)

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Pos Luar Biasa

Rp0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNBP	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0,00
Beban Persediaan	0	0	0,00
Jumlah	**0**	**0**	**0,00**

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiliki Pos Luar Biasa.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp4.273.576.054

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 4.273.576.054,- dan Rp1.569.508.502

Defisit LO

Rp(4.488.697.620)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31

Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp (4.488.697.620) dan Rp (13.595.112.668). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.3.1Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp32.629.900,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 32.629.900,- dan Rp 0,0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,-

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah

masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggitidak memiliki Selisih Revaluasi Aset Tetap.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2021

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	
Jumlah	**-**

Koreksi Lain-Lain Rp (1.990.100.491);

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp (1.990.100.491); dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	1.990.100.491
Jumlah	**1.990.100.491**

Transaksi Antar Entitas Rp 3.037.575.334;

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 3.037.575.334,- dan Rp16.299.180.220;- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	TA 2021	TA 2020
Diterima dari Entitas Lain	(5.400.999)	(25.789.987)
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.042.976.333	3.859.747.786
Transfer Masuk	-	70.352.171
Transfer Keluar	-	
Pengesahan Hibah Langsung	-	12.394.870.250
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	
Jumlah	**3.037.575.334**	**16.299.180.220**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Diterima dari Entitas Lain Rp.0;

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar Rp 0 sedangkan DKEL sebesar Rp 0

Tranfer Masuk/ Transfer Keluar Rp. 0;

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31

Desember 2021 sebesar Rp 0,00 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	-	-
3	Persediaan	-	-
	Jumlah		**-**

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember sebesar Rp0. Dalam hal ini KPU Kota Bukittinggi tidak memiliki transfer keluar dan tranfer masuk.

Ekuitas Akhir Rp. 864.983.177;

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 864.983.177 dan Rp. 4.273.576.054;-

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tidak memiliki kejadian-kejadian penting setelah tanggal Neraca..

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 8/HK.03.2-KPT/1375/Sek-Kot/I/2021 Tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi pada tanggal 8 Januari 2021 telah ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Ir.Kasdanil, SH
Pejabat Pembuat Komitmen	: Mega Ardila, S.Ikom, M.Si
PPSPM	: Benny Rinaldo,SH
Bendahara	: Trianica Fajri.A.Md

Lampiran I: Rincian Akumulasi Penyusutan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny. S/D	Beban Peny.	Akm. Peny.	Total Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		31-12-2021	31-12-2021	Per 30-06-2021	Per 30-06-2021	Per 31-12-2021
A	**Tanah**							
1	Tanah	-	-	-	-		-	-
	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0
B	**Peralatan dan Mesin**							
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	11	1.143.105.000	671.055.714	94.487.143	-	765.542.857	**377.562.143**
2	Alat Kedokteran	1	2.530.000	506.000	506.000	-	1.012.000	**1.518.000**
3	Alat Kantor	40	114.860.910	82.569.977	11.536.982	-	94.106.959	**20.753.951**
4	Alat Rumah Tangga	63	223.839.600	110.428.980	40.358.720	-	150.787.700	**73.051.900**
5	Alat Studio	10	56.892.050	26.471.255	9.913.010	-	36.384.265	**20.507.785**
6	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	1	12.694.000	2.961.931	846.266	-	3.808.197	**8.885.803**
7	Alat Khusus Kepolisian	2	11.892.200	19.285.126	2.973.050	(11.852.500)	10.405.676	**1.486.524**
8	Unit Alat Laboratorium	0	0	18.927.400	-	(18.927.400)	-	-
9	Alat Komunikasi	4	28.156.500	9.630.150	3.950.900	-	13.581.050	**14.575.450**
10	Komputer Unit	50	648.717.730	487.610.005	89.260.159	-	576.870.164	**71.847.566**
11	Peralatan Komputer	60	407.061.689	281.503.235	78.032.238	(1.850.000)	357.685.473	**49.376.216**
12	Alat Kerja Penerbangan	1	18.927.400	-	1.892.740	-	1.892.740	**17.034.660**
13	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	1	5.830.000	2.332.000	583.000	-	2.915.000	**2.915.000**
	Jumlah	244	**2.674.507.079**	**1.713.281.773**	**334.340.208**	**(32.629.900)**	**2.014.992.081**	**659.514.998**
C	**Gedung dan Bangunan**							
1	Bangunan Gedung Tempat kerja	2	131.228.000	11.422.397	3.263.542	-	14.685.939	**116.542.061**
	Jumlah	**2**	**131.228.000**	**11.422.397**	**3.263.542**	**-**	**14.685.939**	**116.542.061**
D	**Aset Tetap Yang Tidak Digunakan**							
1	Alat Ukur	1	1.089.000	1.089.000	-	-	1.089.000	-
2	Alat Kantor	3	3.019.000	3.019.000	-	-	3.019.000	-
3	Alat Rumah Tangga	4	16.663.700	16.663.700	-	-	16.663.700	-
4	Alat Studio	12	10.821.400	10.821.400	-	-	10.821.400	-
5	Alat Komunikasi	2	3.014.000	3.014.000	-	-	3.014.000	-
6	Unit Alat Laboratorium	10	2.172.000	2.172.000	-	-	2.172.000	-
7	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	1	24.550.000	16.366.665	1.636.667	-	18.003.332	**6.546.668**
8	Alat Khusus Kepolisian	1	4.999.500	4.999.500	-	-	4.999.500	-
9	Komputer Unit	6	54.260.787	54.260.787	-	-	54.260.787	-
10	Peralatan Komputer	29	32.425.300	32.425.300	-	-	32.425.300	-
	Jumlah	**69**	**153.014.687**	**144.831.352**	**1.636.667**	**-**	**146.468.019**	**6.546.668**
	Total		**2.958.749.766**	**1.869.535.522**	**339.240.417**	**(32.629.900)**	**2.176.146.039**	**782.603.727**

* Beban Amortisasi